

**ANALISIS KOORDINASI CAMAT DALAM PELAKSANAAN PROGRAM
NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) MANDIRI PERKOTAAN
DI KECAMATAN KEDAWUNG KABUPATEN CIREBON
(STUDI KASUS DI DESA KALIKOA)**

OLEH

Dr. H. Achdi halim. Drs.,m.si.

Hj. Hery Nariyah, Dra.,M.Si

Abstract

The title of the study is: "Analysis of the Implementation Coordination Sub National Community Empowerment Program (PNPM) Mandiri Urban District Kedawung In Cirebon Regency Village Kalikoa case study". This study reports the results of the background by the lack of support and guarantee the smooth implementation of PNPM Urban Village District Kalikoa Kedawung Cirebon regency. This study aimed to determine the extent of coordination is done by the Head Kedawung and constraints. The research method used is descriptive qualitative approach to the research took place in the Village District Kalikoa Kedawung Cirebon regency. Meanwhile, the key informants (key informants) in this study is the Village Facilitators (FASKEL). Data collection techniques used are literature studies, and observation. The results showed that the coordination of the implementation of PNPM Urban Kedawung district level, the coordination of the 4 principles are 3 principles of coordination that have done well that coordination should be done from the very beginning stages, all possibilities should be coordination meetings together, the differences in view should be expressed openly and investigated in relation to the overall situation. While the principle has not been properly implemented the coordination is done continuously. This is due to lack of communication and developmental factors Human Resources (HR) is still low.

A. PENDAHULUAN

A.1 Latar Belakang Penelitian

Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak 1999 sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan. Program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial (*social capital*) masyarakat di masa mendatang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat.

Lembaga Kepemimpinan Masyarakat yang mengakar, representatif dan dipercaya tersebut (Badan Keswadayaan Masyarakat atau disingkat BKM) dibentuk melalui kesadaran kritis masyarakat untuk menggali kembali nilai-nilai luhur kemanusiaan dan nilai-nilai kemasyarakatan sebagai pondasi modal sosial (*capital social*) kehidupan masyarakat.

BKM ini diharapkan dapat menjadi wadah perjuangan kaum miskin dalam meyarakan aspirasi dan kebutuhan mereka, tiap BKM bersama masyarakat telah menyusun Perencanaan Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan (PJM Pronangkis) secara partisipatif, sebagai prakarsa masyarakat untuk menanggulangi kemiskinan di wilayahnya secara mandiri. Atas fasilitasi pemerintah dan prakarsa masyarakat, BKM-BKM ini mulai menjalin kemitraan dengan berbagai instansi pemerintah dan kelompok peduli setempat.

Pelaksanaan P2KP-1 hingga pelaksanaan P2KP-3 saat ini secara Nasional telah terbentuk sekitar 6.405 BKM yang tersebar di 1.125 Kecamatan di 235 Kota atau Kabupaten, dan telah memunculkan lebih dari 291.000 relawan-relawan dari masyarakat setempat, serta

telah mencakup 18,9 juta orang pemanfaat (penduduk miskin), melalui 243.838 Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Mempertimbangkan perkembangan positif P2KP tersebut mulai tahun 2007 telah dirintis untuk mengadopsi P2KP menjadi bagian dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan), oleh sebab itu mulai tahun tersebut PNPM Mandiri Perkotaan diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan Index Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran *Millennium Development Goals* (MDGs) sehingga tercapai pengurangan penduduk miskin sebesar 50% di tahun 2015.

Tahun 2008 secara penuh P2KP menjadi PNPM Mandiri Perkotaan. Sebagai bagian dari PNPM Mandiri maka tujuan, prinsip dan pendekatan yang ditetapkan dalam PNPM Mandiri juga menjadi tujuan, prinsip dan pendekatan PNPM Mandiri Perkotaan.

PNPM Mandiri Perkotaan maka diperlukan adanya kesatuan tindakan melalui koordinasi yang dilakukan oleh unit kerja terkait baik ditingkat Pusat, Provinsi, Kota atau Kabupaten maupun tingkat Kecamatan. Hal ini disebabkan karena program tersebut tidak hanya tanggung jawab satu Instansi atau satu Departemen saja melainkan seluruh unit dan jajaran yang terlibat di dalamnya.

Koordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen yang penting dalam pencapaian tujuan, dimana dalam hal ini pencapaian keberhasilan PNPM Mandiri Perkotaan memerlukan peran Camat sebagai pemberi dukungan dan jaminan atas kelancaran pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya. Di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung terdapat 8 Rukun Warga (RW) yang diantaranya 4 RW yang mendapatkan PNPM Mandiri Perkotaan dan 4 RW yang tidak mendapatkan PNPM Mandiri Perkotaan.

Masalah tersebut diatas diduga disebabkan masih rendahnya kesadaran masyarakat, hal ini dapat terlihat dari :

1. Kurangnya Swadaya Masyarakat.
2. Kualitas Sumber Daya Masyarakat (SDM) yang masih rendah.
3. Lemahnya Komunikasi antara BKM dan Fasilitator Kelurahan (FASKEL)
4. Belum tercapainya target 100% mengenai Bantuan Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU).

Atas dasar latar belakang diatas penyusun tertarik untuk menetapkan judul laporan Riset dan Praktek ini :

“Analisis Koordinasi Camat Dalam Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan di Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon (Studi Kasus di Desa Kalikoa)”.

A.2 Perumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan koordinasi oleh Camat dalam meningkatkan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung?
2. Bagaimana pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon?
3. Bagaimana dampak dari PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Kalikoa?
4. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi oleh Camat dalam pelaksanaan koordinasi dalam upaya peningkatan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Kalikoa?

A.3 Tujuan dan Kegunaan Riset dan Praktek

1. Mengetahui pelaksanaan koordinasi oleh Camat dalam upaya mencapai keberhasilan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung.
2. Mengetahui pelaksanaan program tersebut di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon.
3. Mengetahui dampak PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung.

4. Mengetahui hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Camat dalam pelaksanaan koordinasi dalam upaya pencapaian keberhasilan PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung.

Kegunaan Praktis, yaitu :

1. Untuk mengevaluasi dan memperbaiki dalam rangka meningkatkan efektivitas koordinasi PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung.
2. Untuk mengetahui program-program apa saja yang sudah, belum, dan akan dilaksanakan.
3. Memberikan gambaran yang jelas mengenai dampak dari PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung.
4. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah setempat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kegunaan Teoritis yaitu :

1. Memperkaya khasanah keilmuan dan literatur dalam bidang koordinasi PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung.
2. Memberikan tambahan informasi bagi mahasiswa khususnya mengenai bahasan tentang koordinasi PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung.
3. Menambah ilmu dan pengetahuan khususnya bagi penyusun tentang PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung dan mengetahui dampak-dampaknya.

A.4. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan

PNPM Mandiri Perkotaan merupakan perwujudan dari P2KP, dimana program ini sangat strategis karena menyiapkan landasan kemandirian

masyarakat berupa lembaga kepemimpinan masyarakat yang representatif, mengakar dan kondusif bagi perkembangan modal sosial masyarakat di masa datang serta menyiapkan program masyarakat jangka menengah dalam penanggulangan kemiskinan yang menjadi pengikat dalam kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat.

Tujuan PNPM Mandiri Perkotaan sebagai berikut :

- a. Terbangunnya lembaga masyarakat berbasis nilai-nilai universal kemanusiaan, prinsip-prinsip kemasyarakatan dan berorientasi pembangunan berkelanjutan, yang aspiratif, representatif, mengakar, mampu memberikan pelayanan pada masyarakat miskin dalam proses pengambilan keputusan lokal dan mampu menjadi wadah sinergi masyarakat dalam penyelesaian permasalahan yang ada di bawahnya.
- b. Meningkatnya akses bagi masyarakat miskin perkotaan ke pelayanan sosial, sarana dan prasarana serta pendanaan (modal) termasuk membangun kerja sama dan kemitraan sinergi ke berbagai pihak terkait, dengan menciptakan kepercayaan pihak-pihak terkait tersebut terhadap Lembaga Masyarakat.
- c. Mengedepankan peran Pemerintah Kota atau Kabupaten agar mereka makin mampu memenuhi kebutuhan masyarakat miskin baik melalui pengokohan Komite Penanggulangan Kemiskinan (KPK) di wilayahnya, maupun kemitraan dengan masyarakat serta kelompok peduli setempat.

Strategi PNPM Mandiri Perkotaan diarahkan untuk :

- a. Mendorong proses transformasi sosial dari masyarakat tidak berdaya/miskin menuju masyarakat berdaya.
Sebagai pondasi yang kokoh untuk memberdayakan masyarakat menuju tatanan masyarakat yang mampu mewujudkan kemandirian dan pembangunan berkelanjutan.

- b. Mendorong proses transformasi sosial dari masyarakat berdaya menuju masyarakat mandiri.

Yang menekankan pada proses pembangunan kolaborasi dan sinergi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan antara masyarakat, Pemerintah Kota atau Kabupaten, dan kelompok peduli setempat agar kemiskinan dapat ditangani secara efektif, mandiri dan berkelanjutan.

- c. Mendorong proses transformasi sosial dari masyarakat mandiri menuju masyarakat madani.

Untuk mampu mewujudkan transformasi dari kondisi masyarakat mandiri menuju masyarakat madani lebih dititik beratkan pada proses penyiapan landasan yang kokoh melalui penciptaan situasi dan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh berkembangnya masyarakat madani melalui intervensi komponen Pembangunan Lingkungan Permukiman Perumahan Terpadu (*Neighbourhood Development*), yakni proses pembelajaran masyarakat dalam mewujudkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan yang berbasis nilai menuju terwujudnya lingkungan permukiman yang tertata, sehat, produktif dan lestari.

A.5 Metodologi Penelitian

Penelitian ini disusun menggunakan metode kualitatif analisis deskriptif dimana dalam penyajian data penyusun menggunakan pemaparan dan gambaran, karena penyusun hanya ingin menggambarkan situasi atau peristiwa.

A.6 Teknik Pengumpulan Data

- 1) Studi Kepustakaan
- 2) Studi Lapangan, terdiri dari :
 - a. Observasi
 - b. Wawancara

A.7 Lokasi Penelitian

Riset dan Praktek Ilmu Administrasi Negara dilaksanakan di Kecamatan

Kedawung Kabupaten Cirebon dengan studi kasus di Desa Kalikoa.

B. TINJAUAN PUSTAKA

B.1 Pengertian Koordinasi

Fungsi manajemen yang memiliki peran penting dalam pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien adalah koordinasi. Dalam hal ini koordinasi berperan dalam menentukan dinamika organisasi yang integral, selaras dan harmonis diantara unit atau organisasi yang terkait dalam upaya pencapaian tujuan organisasi.

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, jelas bahwa dalam upaya mewujudkan tujuan organisasi diperlukan penerapan fungsi-fungsi manajemen, salah satu fungsi manajemen yang mempunyai peran yang sangat penting dalam pencapaian tujuan organisasi adalah koordinasi.

B.2 Unsur, Tipe, dan Cara-Cara Koordinasi

Organisasi merupakan suatu kesatuan sistem yang terdiri dari unit-unit dengan tugas aktifitas yang terspesialisasi dan berbeda satu sama lain, oleh karena itu diperlukan penyatuan, integrasi dan sinkronisasi seluruh kegiatan organisasi agar pencapaian tujuan organisasi dapat maksimal. Terkait dengan hal tersebut koordinasi memiliki peran yang sangat penting yaitu untuk menyatupadukan gerak sumber daya dan unit-unit kerja dalam operasionalisasi organisasi yang berlainan tugas dan fungsi agar seluruh aktivitas tersebut mengarah pada sasaran yang sama untuk memudahkan tercapainya sasaran yang efisien. Adapun unsur-unsur koordinasi menurut Nasution (1996:226) terdiri dari:

1. Unit kerja yaitu kelompok kerja dalam organisasi yang memiliki fungsi berbeda.
2. Sumber-sumber daya (potensi) yaitu sumber atau potensi pada unit-unit organisasi baik anggota organisasi

(SDM), fasilitas, modal, perlengkapan produksi dan lain-lain.

3. Kesatupaduan yaitu hubungan yang terdapat anatar unit atau organisasi sehingga dapat mewujudkan aktivitas yang terintegrasi atau aktivitas sebagai satu kesatuan yang terpadu.
4. Gerak aktivitas yaitu daya upaya yang dilakukan manajer atau pemimpin organisasi dalam menjalankan tugasnya guna mencapai tujuan organisasi.
5. Keselarasan yaitu urutan dalam pelaksanaan pekerjaan yang sudah tersusun dengan baik dan dilakukan pada waktu yang bersamaan tanpa menimbulkan pertentangan meskipun pada unit kerja yang sama atau berbeda.
6. Arah yang sama yaitu suatu hal yang ditetapkan sebagai pedoman sasaran yang telah ditetapkan.

B.3 Tipe-Tipe Koordinasi

1. Koordinasi vertikal yaitu kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit kesatuan-kesatuan kerja yang ada dibawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tugasnya, atasan mengkoordinasi semua aparat yang berada dibawah tanggung jawabnya secara relatif mudah dilakukan, karena atasan mudah memberikan sanksi kepada aparat yang sulit diatur.
2. Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi yang singkat, koordinasi horizontal terdiri atas:
 - a. *Interdisciplinary* yaitu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan dan menciptakan disiplin antar unit yang lain secara intern maupun secara ekstern pada unit-unit yang sama tugasnya.
 - b. *Interrelated* yaitu koordinasi antar badan (instansi), unit-unit yang

fungsinya berbeda, tetapi instansi dengan yang lain saling terkait baik intern maupun ekstern yang levelnya setaraf. Koordinasi horizontal relative sulit dilakukan karena coordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang sulit diatur karena kedudukannya setingkat.

B.4 Prinsip-Prinsip Koordinasi

Prinsip-prinsip koordinasi menurut Sugandha (1988 : 47) :

1. Adanya kesepakatan dan kesatuan pengertian mengenai sasaran yang harus dicapai sebagai arah kegiatan bersama.
2. Adanya kesepakatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak termasuk target dan jadwal.
3. Adanya ketaatan dan loyalitas dari setiap pihak terhadap bagian tugas masing-masing serta jadwal yang telah ditetapkan.
4. Adanya saling tukar informasi dari semua pihak yang bekerjasama mengenai kegiatan dan hasilnya pada suatu saat tertentu, termasuk masalah yang dihadapi masing-masing.
5. Adanya koordinator yang dapat memimpin dan menggerakkan serta memonitor kerjasama tersebut, serta memimpin pemecahan masalah bersama.
6. Adanya informasi dari berbagai pihak yang mengalir kepada koordinator sehingga koordinator dapat memonitor seluruh pelaksanaan kerjasama dan mengerti masalah-masalah yang dihadapi oleh semua pihak.
7. Adanya saling menghormati terhadap wewenang fungsional masing-masing sehingga tercipta semangat untuk saling membantu.

C. OBJEK PENELITIAN

C.1 Letak dan Kondisi Geografis

Kecamatan Kedawung merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Cirebon, secara topografi Kecamatan Kedawung adalah daerah dataran rendah dengan rata-rata ketinggian 6 meter dari permukaan laut. Kecamatan Kedawung terdiri dari delapan (8) wilayah Desa yaitu Desa Kalikoa, Kedungdawa, Tuk, Kedungjaya, Kertawangun, Sutawangun, Pilangsari.

C.2. Visi dan Misi Kecamatan Kedawung

- **Visi**
“Terwujudnya aparatur pemerintah yang berkualitas, yang mampu mewujudkan pelayanan prima seiring meningkatnya kesejahteraan pokok masyarakat”.
- **Misi**
 - Meningkatkan kebijakan dan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan cepat, tepat dan benar serta efektif dan efisien
 - Meningkatkan pelayanan masyarakat dengan efektif dan efisien baik waktu maupun peraturan yang berlaku.
 - Meningkatkan pelayanan atau terpenuhinya kebutuhan dasar yang satu sama lain bisa saling berpengaruh yakni meningkatnya tingkat pengetahuan atau pendidikan masyarakat, dan terwujudnya tingkat pendapatan masyarakat.

D. PEMBAHASAN

D.1 Pelaksanaan Koordinasi Oleh Camat Kedawung Kabupaten Cirebon

Koordinasi sebagai salah satu fungsi manajemen mempunyai peranan yang sangat penting didalam upaya menyelaraskan dalam berbagai kebijakan yang harus dilakukan oleh berbagai unsur

atau pihak untuk dapat mencapai tujuan bersama. Kaitannya dengan peningkatan PNPM, maka Camat sebagai Kepala Kecamatan harus mampu melaksanakan koordinasi terhadap berbagai pihak terkait agar upaya yang dilakukakan tersebut dapat terarah dengan baik.

Mengetahui pelaksanaan koordinasi oleh Camat Kedawung Kabupaten Cirebon, penyusun melakukan wawancara terhadap Camat Kedawung beserta KASI EKBANG yang dalam hal ini selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK).

Penyusun menggunakan prinsip-prinsip koordinasi dalam melakukan analisis sebagaimana yang dikemukakan oleh Pamudji. Adapun prinsip-prinsip koordinasi tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi harus dilakukan pada tahap awal sekali
- b. Koordinasi adalah tahap yang kontinyu
- c. Sepanjang kemungkinan koordinasi harus merupakan pertemuan-pertemuan bersama.
- d. Perbedaan-perbedaan pandangan harus dikemukakan secara terbuka dan diselidiki dalam hubungannya dengan situasi keseluruhan.

D.2 Dampak dari PNPM Mandiri Perkotaan

PNPM Mandiri Perkotaan di Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dapat dikatakan sudah cukup berhasil namun belum optimal karena masih ditemui beberapa bantuan seperti Rumah Tidak Layak Huni (RUTILAHU) di Desa Kalikoa yang belum mencapai 100% pelaksanaannya dikarenakan kurangnya Swadaya Masyarakat.

Indikator dari peningkatan PNPM Mandiri Perkotaan, adalah sebagai berikut:

1. **Indikator keberhasilan ditinjau dari segi program**
2. **Indikator keberhasilan ditinjau dari segi kelembagaan**
3. **Indikator keberhasilan ditinjau dari segi keuangan**

D.3 Hamabatan-Hamabatan dan upaya yang telah dilakukan untuk Mengatasi Hambatan

- Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat
- Kurang kesadaran dan motivasi dari masyarakat terhadap PNPM Mandiri Perkotaan
- Kurangnya koordinasi antara fasilitator dan BKM atau relawan

D.4 Upaya-upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi hamabatan hambatan

- Sosialisasi harus dilakukan melalui pertemuan warga, baik dari tingkat RW/dusun hingga Desa.
- Menanamkan jiwa sosial sesama masyarakat
- Koordinasi fasilitator terkait perlu dilakukan secara terus menerus (kontinyu)

D.5 Lingkup Pemberdayaan PNPM Mandiri Perkotaan

Tahapan pelaksanaan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan ditingkat masyarakat pada dasarnya dititikberatkan pada nuansa proses pembelajaran masyarakat. Oleh karena itu, kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan tidak hanya berorientasi pada *output* produk atau dilandasi prinsip sekedar terlaksana semata, namun justru harus benar-benar memperhatikan dinamika proses, kesadaran kritis dan kelembagaan nilai-nilai universal serta proses perubahan perilaku/sikap masyarakat itu sendiri.

E. KESIMPULAN DAN SARANE.1 Kesimpulan

1. Pemerintah Kecamatan Kedawung telah melaksanakan koordinasi sebagai pemberi dukungan dan

jaminan atas kelancaran pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya telah dilaksanakan dan cukup berhasil.

2. Hasil analisa terhadap tanggapan masyarakat mengenai PNPM Mandiri Perkotaan pada umumnya positif. Artinya masyarakat mendukung sekali Program tersebut, karena hasilnya tidak hanya dirasakan oleh warga yang mendapat bantuan program tersebut saja, tapi bantuan program tersebut dapat dirasakan oleh seluruh warga setempat. Dengan kata lain, masyarakat menyambut baik dengan adanya PNPM Mandiri Perkotaan.
3. Dampak dari PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dapat dilihat dari bantuan yang telah terlaksana mengenai *Paving Block* untuk tiap RW yang telah mencapai target 100% keberhasilan pelaksanaannya, dimana *Paving Block* tersebut di buat pada gang yang becek dan kotor, sehingga dengan adanya *Paving Block* tidak akan menghambat aktivitas warga setempat. Bantuan RUTILAHU terlaksana mencapai target 90% dikarenakan 10% masih dalam tahap penyelesaian.
4. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan PNPM Mandiri

Perkotaan di Desa Kalikoa Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon telah dapat di tekan seminimal mungkin.

E.2 Saran

1. Camat dengan PJOK harus lebih meningkatkan koordinasi dengan unsur pelaksana utama di Desa yaitu Kuwu dan Koordinator BKM serta Fasilitator.
2. Dilihat dari indikator keberhasilan program, kelembagaan dan keuangan secara garis besar, angka kemiskinan dilihat dari bidang fisik di Desa Kalikoa mengalami penurunan dalam PNPM Mandiri Perkotaan, karena pada dasarnya program ini mempunyai tujuan untuk menanggulangi kemiskinan walaupun dalam pelaksanaannya, koordinasi masih mengalami hambatan. Dalam hal ini perlu di tingkatkan koordinasi dan pendekatan persuasif terhadap wilayah yang masih berada dalam garis kemiskinan.
3. Upaya-upaya untuk mengatasi hambatan di tingkatan relawan, baik itu antara Fasilitator, BKM, dan KSM, disarankan untuk meningkatkan komunikasi secara terus-menerus.

DAFTAR PUSTAKA

Siagian, Sondang P. 1970. *Administrasi Pembangunan* : PT Bumi Aksara, Jakarta.

Silalahi, Ulbert. 1997. *Studi Tentang Ilmu Administrasi* : Percetakan Sinar Baru Algensindo, Bandung.

Sugandha, Dann. 1988. *Koordinasi alat pemersatu gerak administrasi* : PT. Intermedika, Jakarta.

Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Administrasi* : CV. ALFABETA, Bandung.

Yuwono P. Budi, 2008. *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan*. Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya, Jakarta.

Profil Kecamatan

